

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG**

Diajukan oleh

Nadiya

4518013058



**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Salah Satu Persyaratan**

**Guna Memperoleh Gelar**

**Sarjana EKONOMI**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS BOSOWA**

**MAKASSAR**

**2022**

Halaman Pengesahan

Judul : Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintah  
Daerah Kabupaten Enrekang

Nama : Nadiya

Stambuk/NIM : 4518013058

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Program studi : Akuntansi

Tempat penelitian : Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang

Telah Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Muhammad Idris, S.E., M.Si

  
Thanwain Tala, S.E., M.Si

**Mengetahui Dan Mengesahkan:**

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa

**Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis**

**Ketua Prodi Akuntansi**



  
Dr. Hj. Herminawati Abu Bakar, S.E., M.Si

  
Thanwain Tala, S.E., M.Si

Tanggal Pengesahan:.....

## PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadiya  
NIM : 4518013058  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Judul : Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintah  
Daerah Kabupaten Enrekang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan penerapan asli dari saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 18 juni 2022

Mahasiswa yang bersangkutan

  
Nadiya

***Analysis Of The Accounting Treatment Of Fixed Assets At The Local  
Government Of The District Of Enrekang***

**By**

**Nadiya**

**Accounting Study Program, Faculty Of Economics And Business**

**Bosowa University**

***ABSTRACT***

*Nadiya 2022. Thesis Analysis of Fixed Assets Accounting Treatment at the Enrekang Regency Government which was guided by Mr. Muhammad Idris, S.E., M.Si as consultant I and Mr. Thanwain Tala, S.E., M.Si as consultant II*

*Fixed assets are assets that have a useful life of more than 12 months to be used in government operational activities. This study aims to compare the suitability of accounting treatment for fixed assets of the Regional Finance and Assets Agency of Enrekang Regency with government accounting standards.*

*This research method is qualitative research using comparative analysis method. Comparison is a research analysis method that is carried out by comparing data from the object of research with comparative data. This is done by comparing the Accounting Treatment of Fixed Assets at the Regional Financial and Asset Agency of Enrekang Regency based on PSAP No. 07 of 2010.*

*The results of this study indicate that it is in accordance with government accounting standards with the statement of Government Accounting Standards Number 07. For classification, recognition, measurement, termination and elimination, and depreciation are in accordance with PSAP policy Number 07 of 2010.*

***Keywords:*** *fixed assets, classification of fixed assets, recognition of fixed assets, measurement of fixed assets, depreciation of fixed assets, presentation and disclosure, PSAP 07*

# **ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG**

**Oleh:**

**Nadiya**

**Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis**

**Universitas Bosowa**

## **ABSTRAK**

Nadiya 2022. Analisis Skripsi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Enrekang yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Idris, S.E., M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Thanwain Tala, S.E., M.Si selaku pembimbing II

Aset tetap adalah aset yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang dengan standar akuntansi pemerintah.

Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis komparatif. Perbandingan adalah metode analisis penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan data dari objek penelitian dengan data pembanding. Hal ini dilakukan dengan membandingkan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Enrekang berdasarkan PSAP No. 07 Tahun 2010.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dengan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07. Untuk klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penghentian dan eliminasi, serta penyusutan sudah sesuai dengan kebijakan PSAP Nomor 07 Tahun 2010.

**Kata kunci:** Aset tetap, klasifikasi aset tetap, pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, penyusutan aset tetap, penyajian dan pengungkapan, PSAP 07

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, dan teriring salam dan shalawat hanya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa Makassar, dengan mengambil judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.”

Segala rintangan dan hambatan penulis alami sejak meneliti sampai dengan selesainya skripsi ini. Namun berkat doa dan bantuan berbagai pihak, maka penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini .

1. Pertama-pertama, ucapan terima kasih penulis berikan kepada Bapak Prof. Dr.Ir.Batara Surya, S.T., M.Si. selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Herminawati Abu Bakar, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Indrayani Nur, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak Thainwain Tala, S.E., M.,Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.

5. Kepada Bapak Muhammad Idris, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing 1 dan Bapak Thainwain Tala, S.E., M.,Si. selaku Dosen Pembimbng 2 atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis.
6. Seluruh Dosen Universitas Bosowa Makassar terkhusus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu dan pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah beserta seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar, terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan administrasi.
7. Kepada orang tua saya yang selalu memotivasi dan mendukung peneliti sehingga penulisan skripsi ini bisa sampai pada tahap seperti sekarang ini, terima kasih atas doa dan usaha yang tiada henti-hentinya kepada peneliti.
8. Saudara-saudaraku yang selalu memberikan dorongan dan doa agar lancar kuliah dan skripsinya.
9. Seluruh keluarga besarku yang selalu mendukung dan memotivasi untuk selalu semangat dalam kuliah terlebih untuk tugas akhir yaitu skripsi
10. Untuk sahabatku Dian, wilda, ulfa rahayu,ulfa salsabila, cindy adam, terima kasih atas doa, dukungan serta semangatnya sehingga saya bisa sampai pada tahap ini.
11. Buat teman KKN posko Desa Arungkeke terima kasih untuk semangat dan dorongannya yang selalu ada buat saya.

12. Untuk teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 terkhusus teman kelas Akuntansi-B yang selalu ada dalam suka maupun duka dalam masa perkuliahan di kampus dan diluar kampus

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti. Kritik dan saran konstruktif yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga kebaikan dan masukan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan pahala disisi Allah SWT, Amin ya rabbal alamin.



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACK.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
2.1 Kajian Teori .....	6
2.1.1 Pengertian Akuntansi .....	6
2.1.2 Pengertian Aset Tetap / Aktiva Tetap .....	7

2.1.3	Klasifikasi Aset Tetap .....	8
2.1.4	Karakteristik Transaksi Aset Tetap.....	10
2.1.5	Pengakuan Aset Tetap.....	11
2.1.6	Pengukuran Aset Tetap .....	12
2.1.7	Harga Perolehan Aset Tetap.....	13
2.1.8	Penyusutan Aset Tetap.....	14
2.1.8.1	Faktor - faktor dalam menghitung Beban penyusutan ....	15
2.1.8.2	Metode penyusutan aset tetap .....	16
2.1.9	Penghentian Pengakuan Aset Tetap.....	19
2.1.10	Pengungkapan Aset Tetap.....	19
2.1.11	Penyajian Aset Tetap Dalam Laporan Keuangan .....	20
2.1.12	Hubungan Perlakuan Aset Tetap pada Laporan Keuangan..	21
2.2	Kerangka pikir.....	22
2.3	Hipotesis.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>24</b>
3.1	Tempat Penelitian.....	24
3.2	Metode Pengumpulan Data .....	24
3.3	Jenis Dan Sumber Data .....	25
3.4	Metode Analisis Data.....	26
3.5	Definisi Operasional .....	26
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>28</b>
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	28
4.1.1	Nama Dan Sejarah Singkat BKAD.....	28

4.1.2 Visi Dan Misi Organisasi .....	29
4.1.3 Susunan Dan Tugas Pokok Organisasi BKAD .....	30
4.2 Hasil Penelitian .....	35
4.2.1 Klasifikasi Aset Tetap .....	35
4.2.2 Pengakuan Akuntansi Aset Tetap .....	36
4.2.3 Pengukuran Aset Tetap .....	40
4.2.4 Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap .....	41
4.2.5 Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal .....	42
4.2.6 Penghentian Dan Pelepasan Aset Tetap .....	43
4.2.7 Penyajian Dan Pengungkapan Aset Tetap dalam laporan keuangan .....	44
4.3 Perbandingan Akuntansi Aset Tetap BKAD Dengan SAP .....	45
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>51</b>
5.1 KESIMPULAN .....	51
5.2 SARAN .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>55</b>

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	22



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Table 4.1 Perbandingan pencatatan Aset Tetap .....	35
Table 4.2 Aset Tetap BKAD Kabupaten Enrekang Tahun 2019.....	36
Table 4.3 Aset Tetap Bkad Kabupaten Enrekang Tahun 2020.....	36
Tabel 4.4 Neraca Aset Tetap BKAD Kabupaten Enrekang.....	44
Tabel 4.5 Perbandingan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap BKAD Kabupaten Enrekang PSAP Nomor 07 .....	45

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang memiliki pengaruh strategis dari segi hukum, dan ekonomi yang dideklarasikan pada tahun 1999 adalah otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 5). Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah maka setiap provinsi, kabupaten dan kota yang ada di Indonesia diharuskan untuk melakukan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Aset tetap yang digunakan dalam laporan keuangan mempunyai masa atau periode akuntansi yang berguna dalam rekap pembuatan laporan keuangan. Dalam memanfaatkan aset tetap perusahaan harus mempergunakan aset tetap secara baik dalam profesi yang signifikan terhadap jumlah aset yang dimiliki dalam perusahaan, aset tetap mempunyai batas tertentu dalam penggunaan untuk kepentingan perusahaan, dimana aset tetap bisa juga tidak difungsikan kembali untuk kemajuan perusahaan. Sehingga aset tetap dapat dihentikan. Penghentian aset tetap dapat dilakukan dengan menjual kembali atau ditukarkan kembali untuk kepentingan

perusahaan. Aset tetap adalah aset permanen atau jangka panjang yang digunakan dalam operasi normal perusahaan.

Aset tetap memiliki peran penting untuk kelancaran operasional perusahaan. Untuk memaksimalkan peran ini membutuhkan kebijakan tepat dalam manajemen aset tetap. Dalam keadaan ini, pengambilan keputusan tentu sangat diperlukan alat informasi mengenai aset tetap, seperti akuntansi aset tetap.

Sejak 22 Oktober 2010, Pemerintah telah menerbitkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang hal yang sama. Dalam PP 71 Tahun 2010 terdapat dua SAP yaitu SAP Berbasis Akruwal yang tercantum dalam Lampiran I, dan SAP Berbasis Cash-to-Accrual yang terdapat dalam Lampiran II (lampiran yang memuat kembali semua aturan yang ada dalam PP. 24 Tahun 2005 tanpa perubahan sedikitpun). Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual mulai berlaku pada tanggal Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 diundangkan.

Pernyataan standar akuntansi pemerintahan Nomor 07 adalah standar yang mengatur tentang aset tetap. Tujuan aset tetap ini adalah mengatur perlakuan akuntansi aset tetap. Baik itu pengakuan, pengukuran atau pengungkapan yang digunakan. Apakah akuntansi aset tetap yang dilaksanakan sudah sesuai dengan standar yang sudah diterapkan oleh pemerintah, seperti yang disebutkan dalam PSAP Nomor 07 tentang aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan.

Mengingat pentingnya perlakuan akuntansi terhadap aset tetap yang memiliki pengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan, maka kekeliruan dalam penilaian dan pencatatan serta kebijakan tentang aset tetap berwujud akan mempengaruhi laporan keuangan secara material, sehingga menjadi laporan keuangan tidak wajar. Penyajian aset tetap dalam laporan keuangan secara wajar dan benar akan sangat membantu manajemen perusahaan dalam menyampaikan informasi keuangan yang dapat dipercaya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat digunakan untuk menentukan kegiatan prospektif perusahaan serta dalam pengambilan keputusan untuk memperbaiki kinerja perusahaan dalam mengefisiensikan aset tetap tersebut.

Untuk menghitung penyusutan ini ada beberapa metode yang digunakan seperti, metode garis lurus, metode saldo menurun, yakni tebagi dua yaitu, metode jumlah angka tahun dan metode saldo menurun berganda, ada tiga faktor yang dipertimbangkan untuk menentukan beban penyusutan yaitu, harga perolehan, nilai residu, taksiran umur ekonomis dari aset tersebut sehingga perusahaan perlu menerapkan suatu system informasi akuntansi aset tetap untuk dapat mengestimasi secara akurat umur ekonomis aset tetap tersebut. Hal ini sangat penting karena estimasi ekonomis yang akurat perusahaan dapat mentafsirkan masa pengguna aset tetap tersebut secara lebih efektif.

Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Enrekang merupakan lembaga Pemerintah yang melaksanakan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang menyangkut di bidang penerimaan, belanja, pembiayaan dan aset daerah. Adapun aset tetap yang dimiliki oleh Badan



Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Enrekang yaitu tanah, gedung dan bangunan, mesin dan lain-lain.

Maka dalam hal ini dibutuhkannya suatu penelitian untuk mengetahui sejauh mana Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelolah Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang dapat diterapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini penting dilakukan agar Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang dapat membuat laporan keuangan dengan layak. Laporan keuangan diharapkan mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya guna menilai kemampuan perusahaan. Berdasarkan uraian dari atas maka dalam penyusunan penelitian ini, penulis mengambil judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tahun 2010

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang
2. Untuk membandingkan perlakuan akuntansi aset tetap yang dilaksanakan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk pengembangan diri dan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktek yang sesungguhnya serta menambah wawasan baru mengenai masalah yang diteliti.

### 2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perusahaan untuk memberi masukan bagi perusahaan dalam mengelola aset tetap dan perlakuan akuntansi.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca dan sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai wacana keilmuan bagi yang lainnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Teori

##### 2.1.1 Pengertian Akuntansi

Secara umum pengertian akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan.

Akuntansi menurut Sumarsan (2017:1) merupakan seni yang mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, dan kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk menghasilkan proses informasi keuangan yang berguna bagi para pemakai laporan (users) dalam pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan proses mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan.

Menurut Kieso, et al. (2016:2) Akuntansi terdiri dari tiga kegiatan yang mendasar yaitu identifikasi, pencatatan dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Perusahaan mengidentifikasi peristiwa ekonomi sesuai dengan kegiatan usahanya dan mencatat peristiwa tersebut untuk menyediakan catatan kegiatan keuangan.

“Mendefinisikan akuntansi adalah system informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Kieso, Donald., dkk (2018:4) menyatakan bahwa akuntansi terdiri dari tiga kegiatan yang mendasar yaitu identifikasi, pencatatan dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan.”

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa definisi akuntansi adalah suatu proses mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasikan, mencatat dan menyajikan informasi yang diberikan organisasi melalui laporan keuangan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi suatu organisasi.

### **2.1.2 Pengertian Aset Tetap**

Menurut PSAP 07 aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap merupakan aset berwujud yang digunakan untuk penyediaan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode (IAI, 2017:06). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang mengatur tentang akuntansi aset adalah PSAP Nomor 07. PSAP Nomor 7 mendefinisikan, Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Rusmana, Setyaningrum, dkk., 2017:32).

“Definisi menurut Standar Akuntansi Keuangan (2016: 49) menjelaskan bahwa aset tetap adalah aset berwujud seperti tanah milik perusahaan digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan di sisi lain sehingga mendapatkan keuntungan yang akan digunakan lebih dari satu periode mendatang.”

“Menurut Kieso (2017), Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepada orang lain, atau untuk tujuan administrative, aset tersebut diharapkan dapat digunakan selama lebih dari satu periode.

Definisi menurut Samryn (2016:162) menyatakan bahwa aset Tetap merupakan kelompok aktiva perusahaan yang memenuhi semua kriteria sebagai berikut:

1. Mempunyai masa manfaat atau umur ekonomis lebih dari satu tahun.
2. Dimiliki dengan tujuan untuk digunakan dalam membantu aktivitas perusahaan.
3. Fisik barangnya dapat dilihat dan diraba, sehingga biasa juga disebut Aktiva Tetap.
4. Biasanya mempunyai nilai perolehan yang relative besar.

Definisi menurut Standart Akuntansi Keuangan (2016:49) yaitu menjelaskan bahwa aset tetap merupakan asset berwujud seperti tanah yang dimiliki perusahaan digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan pada pihak lain sehingga mendapatkan laba yang akan digunakan lebih dari satu periode.

Aset atau biasa disebut aset adalah aset yang merupakan sumber daya ekonomi perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan, dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Untuk menghasilkan produk ini peranan aktiva tetap sangat besar, seperti tanah sebagai tempat produksi, gedung sebagai pabrik dan kantor, mesin dan peralatan sebagai alat produksi dan lain-lain.

Tujuan aset tetap yaitu untuk mengetahui cara mendapatkan pengakuan aset tetap yang ada pada suatu perusahaan yang sedang menjadi objek penelitian, sehingga peneliti dapat lebih objektif saat memberikan informasi mengenai kekayaan perusahaan

### 2.1.3 Klasifikasi Aset Tetap

Menurut PSAP 07 SAP PP 71/2010 aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Klasifikasi Aset Tetap yaitu:

1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya dan
6. Kontruksi Dalam Pengerjaan.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya cukup signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

#### **2.1.4 Karakteristik Transaksi Aset Tetap**

“Ardana dan Lukman (2016), Transaksi aset tetap memiliki karakteristik yang membedakannya antara siklus transaksi rutin (siklus pembelian, konversi, penjualan).” Ciri-ciri transaksi aset tetap adalah:

1. Frekuensi transaksi relatif jarang, tetapi melibatkan nilai investasi yang relatif besar.
2. Transaksi (pembelian, pengembangan, perluasan, penjualan, atau penghentian penggunaan) aset tetap memerlukan otorisasi/persetujuan dari manajemen puncak suatu entitas.
3. Pengendalian akan aset tetap sudah dimulai sejak perencanaan pengadaan aset tetap terhadap mekanisme penyusunan atau persetujuan anggaran modal (*capital expenditure*).
4. Anggaran pengadaan atau investasi aset tetap pada dasarnya melalui penerbitan saham/utang jangka panjang.

Aset tetap mempunyai karakteristik tersendiri, suatu aset dikatakan sebagai aset tetap apabila memenuhi beberapa karakteristik, yaitu:

1. Mempunyai wujud fisik.

2. Tidak ditujukan untuk dijual lagi.
3. Memiliki nilai yang material, harga aset tersebut cukup signifikan.
4. Memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari satu tahun buku dan nilai manfaat ekonominya bias diukur dengan handal.
5. Aset digunakan untuk aktivitas normal perusahaan (tidak untuk dijual lagi seperti barang dagang/persediaan atau investasi).

#### **2.1.5 Pengakuan Aset Tetap**

Pengakuan aset tetap menurut PSAP No 07 dalam PP 71 tahun 2010 menyatakan bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset hanya jika memenuhi kriteria :

1. Berwujud
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
3. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Dan pengakuan aset tetap akan dapat diandalkan ketika aset tetap telah diterima atau dialihkan dan kepemilikan berpindah. Dari standar akuntansi keuangan di atas dapat disimpulkan, Suatu aset diakui sebagai aset tetap jika perusahaan sudah mengharapkan untuk menggunakan aset lebih banyak dari satu periode, seperti suku cadang utama dan peralatan siap pakai yang dianggap telah memenuhi kriteria aset tetap



Standar ini tidak menentukan satuan ukuran dalam pengakuan suatu aset tetap. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan dalam menerapkan kriteria pengakuan sesuai dengan kondisi spesifik entitas, pertimbangan tersebut sesuai dengan agregasi unit yang secara individual tidak signifikan, seperti cetakan dan perkakas, kemudian menerapkan kriteria pada nilai agregat. Entitas harus mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan ini terhadap semua biaya perolehan aset tetap. biaya-biaya tersebut termasuk biaya awal untuk mendapatkan atau membangun aset tetap dan biaya-biaya selanjutnya yang dikeluarkan untuk menambah, mengganti atau memperbaikinya.

#### **2.1.6 Pengukuran Aset Tetap**

Menurut PSAP 07 2010 dijelaskan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal apabila terdapat transaksi pertukran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan untuk proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakala meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa

peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkaitan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

### 2.1.7 Harga Perolehan Aset Tetap

Samryn (2015), Harga perolehan tanah merupakan semua pengeluaran yang dilakukan untuk mendapatkan tanah dan penyiapannya yang digunakan sesuai tujuan pemilikannya. Biaya-biaya perolehan tanah biasanya meliputi yaitu :

1. Harga beli
2. Biaya pengalihan hak atas tanah
3. Biaya penyiapan tanah untuk pemakaian
4. Biaya pembebasan tanah, termasuk biaya penyelesaian jika tanah masih terkait dengan hak gadai, hipotek, atau penyitaan pihak ketiga.
5. Peningkatan tambahan atas lahan yang umumnya tidak terbatas.

Dalam menentukan besarnya harga perolehan aset tetap harus disesuaikan dengan perolehan aset tetap. Cara perolehan aset tetap menurut Rudianto (2012:259) adalah sebagai berikut :

#### 1. Pembelian Tunai

aset tetap yang diperoleh melalui pembelian tunai dicatat dalam buku dengan jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut

#### 2. Pembelian Angsuran

Apabila aset tetap diperoleh melalui pembelian angsuran, harga perolehan aset tetap tersebut tidak termasuk bunga. Bunga selama masa angsuran harus dibebankan sebagai beban bunga periode akuntansi berjalan sedangkan yang dihitung sebagai harga perolehan adalah total angsuran ditambah beban tambahan seperti beban pengiriman, bea balik nama, beban pemasangan dan lain-lain.

#### 3. Ditukar dengan Surat Berharga

Aset tetap yang ditukar dengan surat berharga, baik saham atau obligasi perusahaan tertentu, dicatat dalam buku sebesar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar.

#### 4. Ditukar dengan Aset Tetap yang Lain

Jika aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aset lain, maka prinsip harga perolehan tetap harus digunakan untuk memperoleh aset yang baru tersebut, yaitu aset baru harus dikapitalisasi dengan jumlah sebesar harga pasar aset lama ditambah uang yang dibayarkan (jika ada). Selisih antara harga perolehan tersebut dan nilai buku aset.

#### 5. Diperoleh sebagai Donasi

Jika aset tetap diperoleh sebagai donasi, maka aset tersebut dicatat dan diakui sebesar harga pasarnya

### **2.1.8 Penyusutan Aset Tetap**

Dalam PSAP No 07 Paragraf 53 dijelaskan bahwa, “penyusutan adalah alokasi jumlah yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

“Menurut kieso (2017) penyusutan merupakan cara untuk mengalokasikan biaya. Penyusutan adalah proses akuntansi untuk mengkolokasikan biaya perolehan aset tetap berwujud kepada beban secara sistematis dan rasional pada periode – periode di mana perusahaan mengharapkan manfaat dari penggunaan aset.”

Dalam akuntansi, penyusunan lebih spesifik dengan penurunan nilai aset karena berlalunya waktu, karena normal, atau karena faktor alam. Penyusutan aset tetap adalah proses penentuan harga perolehan aset tetap selama taksiran umur ekonomis aset yang bersangkutan. Bagian yang dihitung untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan, atau 1 tahun diberi nama biaya penyusutan biaya

adalah bagian dari rekening laba rugi yang dicatat disebelah debit jika bertambah dan dicatat di sisi kredit jika berkurang.

Biaya ini tidak menghasilkan pengeluaran tunai. Pengumpulan biaya yang digunakan selama penggunaan aset tetap dihitung sebagai akumulasi sehingga menjadi akumulasi penyusutan aset tetap. Akun ini disajikan sebagai pengurang dari biaya perolehan aset tetap di neraca. Dalam penjurnalan, akumulasi penyusutan dicatat di sisi kredit jika bertambah dan dicatat di sisi debit jika berkurang. Dalam praktiknya, penggunaan pemotongan terus berkembang lebih sering jika penarikan aset tetap dari pemakaian normal.

Dilihat dari perspektifnya, aset tetap dapat dikelompokkan menjadi aset tetap yang dapat disusutkan dan aset yang tidak dapat disusutkan. Tanah selain untuk lokasi penambangan merupakan satu-satunya aset tetap yang tidak dapat disusutkan alasannya karena tanah adalah aset yang tidak terdepresiasi nilainya, dan bahkan dalam kondisi ekonomi inflasi nilai ekonomi meningkat dari tahun ketahun. Selain tanah seperti itu, aset tetap yang lain dapat dikelompokkan sebagai aset tetap yang dapat disusutkan.

#### **2.1.8.1 Faktor - Faktor Dalam Menghitung Beban Penyusutan**

##### **1. Harga perolehan (*cost*)**

Yaitu uang yang dikeluarkan atau utang yang timbul dan biaya-biaya lain yang terjadi dalam memperoleh suatu aset dan menemukannya agar dapat digunakan.

## 2. Nilai residu

Nilai sisa suatu aset yang disusutkan adalah jumlah yang diterima pada saat aset tersebut dijual, ditukar atau dengan cara lain pada saat aset tersebut tidak dapat digunakan lagi, dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat penjualan/penukarannya.

## 3. Taksiran masa manfaat (*useful life*)

Taksiran umur manfaat (masa manfaat) suatu aset dipengaruhi oleh cara pemeliharaan dan kebijakan yang diambil dalam reparasi. Perkiraan usia ini dapat dinyatakan dalam satuan periode waktu, satuan produksi atau satuan jam kerja. Dalam memperkirakan masa manfaat suatu aset, penyebab keharusan fisik dan fungsional harus dipertimbangkan.

### **2.1.8.2 Metode Penyusutan Aset Tetap**

Perhitungan penyusutan untuk setiap periode penggunaan akan tergantung pada metode yang digunakan oleh perusahaan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung beban penyusutan. Ketepatan dalam memilih metode penyusutan aset tetap juga harus diperhatikan. Ketepatan dalam menghitung biaya penyusutan aset tetap akan mempengaruhi besarnya laba rugi perusahaan dalam setiap periode akuntansi.

“Menurut Kieso (2017) metode yang dapat digunakan untuk menghitung beban penyusutan adalah:”

#### 1. Metode Garis Lurus

Metode ini merupakan metode penyusutan yang paling sederhana dan paling banyak digunakan. Dengan cara ini beban penyusutan untuk setiap periode

jumlahnya sama (kecuali ada penyesuaian). Rumus yang digunakan metode ini adalah:

$$\text{Penyusutan} = \frac{\text{HP}-\text{NR}}{n}$$

Keterangan:

HP = Harga Perolehan

NR = Nilai Residu

n = Taksiran Umur Manfaat

## 2. Metode aktifitas (unit penggunaan atau unit produksi)

Dalam metode aktivitas, juga dikenal sebagai pendekatan pembebanan variabel atau pendekatan unit produksi mengasumsikan bahwa penyusutan adalah fungsi dari penggunaan atau produktivitas, dan bukan fungsi dari berlalunya waktu. Perusahaan mempertimbangkan umur aset tetap dalam hal output yang dihasilkan (jumlah unit yang diproduksi), atau ukuran input seperti jumlah jam kerja mesin.

Rumus yang digunakan dalam metode ini adalah:

$$\text{Penyusutan} = \frac{\text{HP} - \text{NR} \times \text{Jumlah Jam Tahun}}{n}$$

Keterangan:

HP = Harga Perolehan

NR = Nilai Residu

n = Total Estimasi Jam

## 3. Metode Beban Menurun

Beban penyusutan tahun pertama dengan menggunakan metode ini menghasilkan beban penyusutan yang lebih tinggi di tahun awal dan beban yang lebih rendah di tahun berikutnya.

Ada dua cara untuk menghitung beban penyusutan yang menurun dari tahun ke tahun:

a. Metode jumlah angka tahun

Beban penyusutan dihitung dengan mengalikan bagian pengurang (*reducing fractions*) yang setiap tahunnya selalu menurun dengan harga perolehan dikurang dengan nilai residu. Jika aktiva tetap mempunyai umur ekonomis yang panjang, maka penyebutnya (jumlah angka tahun) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Angka Tahun} = \frac{n(n+1)}{n}$$

Keterangan :

n = Taksiran Umur Manfaat

b. Metode saldo menurun

Metode ini menentukan biaya penyusutan yang dihitung dengan mengalikan tarif tetap dengan nilai buku aset karena nilai buku aset selalu menurun setiap tahun, biaya penyusutan setiap tahun juga menurun. Tarif ini dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Penyusutan} = \text{HP} \times \text{Tarif penyusutan}$$

Keterangan:

HP = Harga Perolehan

### **2.1.9 Penghentian Pengakuan Aset Tetap**

Dalam PSAP No 07 paragraf 79 aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus di pindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Dan dalam PSAP No 07 menyatakan bahwa aset tetap di hentikan pengakuannya (paragraf 77):

1. Pada saat di lepaskan atau
2. Pada saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan pelepasannya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

### **2.1.10 Pengungkapan Aset Tetap**

Dalam PSAP No 07 paragraf 80 Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat.
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - a. Penambahan;
  - b. Pelepasan;
  - c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
  - d. Mutasi aset tetap lainnya.



3. Informasi penyusutan, meliputi:

- a. Nilai penyusutan;
- b. Metode penyusutan yang digunakan;
- c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
- d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode

4. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk setiap jenis aset tetap sebagai berikut

1. Dasar penilaian
2. Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode seperti penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai. Aset tetap
3. Informasi penyusutan seperti, nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan umur manfaat atau tingkat penyusutan yang digunakan, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

#### **2.1.11 Penyajian Aset Tetap Dalam Laporan Keuangan**

Menurut PSAP 07 SAP PP 71/2010, laporan keuangan adalah laporan terstruktur atas posisi keuangan dan transaksi suatu entitas pelapor. Perhitungan terkait pos-pos aset tetap yang relevan, akurat dan dapat diukur secara andal disajikan dalam laporan sebagai berikut:

1. Laporan realisasi anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan
2. Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas pelapor mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu
3. Laporan operasional menyajikan gambaran tentang sumber daya ekonomi yang meningkatkan pemerataan dan pemanfaatannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode laporan

#### **2.1.12 Hubungan Perlakuan Aset Tetap Terhadap Laporan Keuangan**

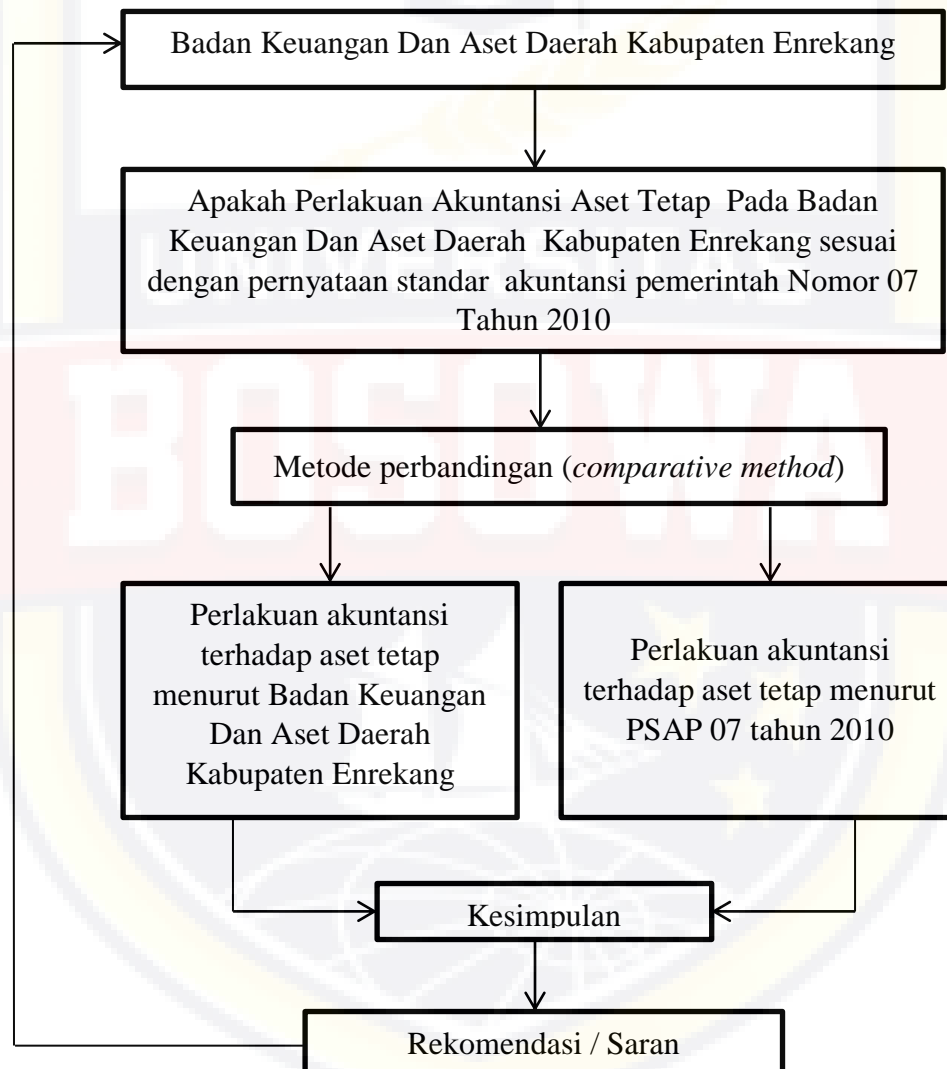
Laporan keuangan merupakan ikhtisar dari suatu proses pencatatan, yaitu ikhtisar transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.

“Menurut Idris (2019), Laporan Keuangan memberikan gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana neraca mencerminkan nilai aset, hutang dan modal sendiri pada suatu waktu tertentu, dan laporan laba rugi mencerminkan hasil yang dicapai selama suatu periode. jangka waktu tertentu biasanya meliputi jangka waktu satu tahun.”

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai laporan keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang berguna bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Standar akuntansi keuangan menganut konsep dasar historis sehingga Penyajian aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan. Nilai aktiva tetap dalam neraca juga harus mempertimbangkan nilai yang dibebankan sebagai beban. Hal ini disebabkan karena nilai aktiva tetap mengalami penurunan dari waktu ke waktu

karena sebagian dari nilai tersebut dialokasikan secara sistematis untuk menjadi beban per periode melalui penyusutan. Dasar penilaian, metode penyusutan dan komitmen atau penggunaan aset tetap sebagai jaminan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

## 2.2 Kerangka Pikir



Gambar 2.1  
Kerangka Konsep

### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan masalah pokok yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis menetapkan hipotesis penelitian sebagai berikut.

“Diduga bahwa Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang Tidak Sesuai Dengan Standar Yang Berlaku Di Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No 07 Tahun 2010 tentang aset tetap”



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Enrekang. Adapun waktu peneliti diperkirakan kurang lebih 2 bulan yang akan dimulai pada bulan Maret Sampai April 2022.

#### 3.2 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Oleh karena itu, peneliti harus menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat. Ketepatan dalam menentukan dan memilih teknik pengumpulan data merupakan salah satu syarat keberhasilan penelitian. Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang tepat diharapkan dapat memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang valid dan informasi yang dibutuhkan dapat saling melengkapi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan rincian sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan (*Field Researd*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan mengadakan kunjungan secara langsung kepada obyek penelitian yang telah ditetapkan.
2. Dokumentasi ialah sumber pengumpulan data melalui pencatatan secara langsung khususnya pada pembelian aset tetap, penghentian aset tetap, penyusutannya sampai pada penyajian dan pengungkapan aset tetap dalam

laporan keuangan serta menyalin hal-hal yang dipandang perlu dan mendukung dalam penelitian ini.

3. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan pimpinan dan staf perusahaan untuk memperoleh informasi yang berkaitan langsung dengan aktiva tetap perusahaan dan dengan alasannya.
4. Observasi adalah teknik yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan tepat tentang objek yang diteliti melalui pengamatan langsung terhadap objek, subjek dan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pada setiap bagian. Teknik ini akan dilakukan untuk melengkapi data yang telah dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi.

### **3.3 Jenis Dan Sumber Data**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Dalam penelitian ini penelitian juga menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara atau tanya jawab oleh peneliti terhadap objek penelitian

2. Data sekunder

Data skunder merupakan data penelitian yang diperleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat) oleh pihak lain). Data sekunder

umumnya berupa bukti, catatan, atau data laporan sejarah yang telah disusun dalam arsip yang diterbitkan dan tidak dipublikasikan. Data yang dikumpulkan melalui catatan dan dokumen resmi perusahaan data yang telah diproses seperti sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan dokumentasinya.

### **3.4 Metode Analisis**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis komparatif. Analisis merupakan penguraian suatu pokok secara sistematis dalam menentukan bagian, hubungan antar bagian serta hubungannya secara menyeluruh untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang tepat. Metode Komparatif adalah metode analisis penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan data dari objek penelitian dengan data pembanding. Hal ini dilaksanakan yaitu dengan cara membandingkan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang berdasarakan SAP No 07 tahun 2010

### **3.5 Definisi Oprasional**

Variabel penelitian adalah sebagai berikut :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan dan perbuatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
2. Perlakuan akuntansi aset tetap adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan pada aset tetap mulai dari perolehan aset tetap, penyusutan aset tetap hingga pelepasan aset tetap. Perlakuan akuntansi aset tetap harus dilakukan dengan benar karena adanya keterkaitan perhitungan, guna melakukan perhitungan

pada penyusutan aset tetap. Sementara pelepasan aset tetap dihitung berdasarkan aset tetap setelah penyusutan.

3. Aset tetap dalam akuntansi adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.
4. Pengakuan dan pengukuran aset tetap adalah aset tetap dicatat (diakui) dalam laporan keuangan yang dilakukan pada awal perolehan aset tetap juga dilakukan pada periode setelah aset tetap tersebut diperoleh.
5. Pelepasan aset tetap adalah kegiatan pengurangan jumlah aset yang dilakukan perusahaan karena berbagai alasan, salah satunya karena habisnya masa manfaat dan umur ekonomis aset tersebut.
6. Penyajian aset tetap adalah penyajian dalam neraca yang harus dilaporkan sebesar harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan.
7. Pengungkapan aset tetap adalah entitas harus mengungkapkan dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah untuk memperoleh aset tetap, penyusutan dan metode penyusutan aset tetap tersebut.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum objek penelitian**

##### **4.1.1 Nama Dan Sejarah Singkat BKAD**

Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pemerintah Kabupaten Enrekang yang merupakan satuan kerja pengelola keuangan daerah. Cikal bakal dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang sebelumnya yaitu berasal dari Bagian Keuangan Sekretariat Daerah sehubungan dengan semakin kompleksnya tugas-tugas pengelola keuangan daerah, maka dibentuklah suatu organisasi perangkat daerah yang khusus menangani pengelolaan keuangan daerah yang diberi nama Badan Pengelola Keuangan Daerah ( BKAD ) yang ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Enrekang Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Enrekang dan keputusan Bupati Enrekang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang.

Pada tahun 2008 pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Dengan diterbitkannya peraturan pemerintah tersebut maka dilakukan perubahan kembali terhadap organisasi perangkat daerah di Kabupaten Enrekang sehingga Badan Keuangan Daerah (BPKD) berubah nama menjadi Dinas Keuangan dan Aset

Daerah (BKAD) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Enrekang termasuk dalam peraturan daerah ini melebur Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) dan Bagian Aset Sekretariat Daerah menjadi bagian dari struktur/susunan organisasi dari Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Enrekang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang.

Pada tahun 2016, Pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang. Dengan berlaku peraturan tersebut maka kembali dilakukan perubahan terhadap organisasi perangkat daerah di Kabupaten Enrekang termasuk Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Kembali menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah. Pada perubahan ini Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dimekarkan menjadi tiga Organisasi Perangkat Daerah yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan khusus untuk Bidang Aset kembali menjadi salah satu Bagian di Sekretariat Daerah.

#### **4.1.2 Visi Dan Misi Organisasi**

1. Visi Badan Pengelola Keuangan Daerah, Kabupaten Enrekang: “Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, ekonomis,

transparansi, dan akuntabel, untuk gerakan membangun Enrekang maju, aman, dan sejahtera.

## 2. Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah, Kabupaten Enrekang:

- a. Mengoptimalkan seluruh pendapatan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki.
- b. Meningkatkan pengendalian pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Meningkatkan sumber daya aparatur penatausahaan pengelola keuangan dan aset daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

### **4.1.3 Susunan Dan Tugas Pokok Organisasi BKAD Kabupaten Enrekang Terdiri Dari:**

#### 1. Kepala BKAD

Badan Pengelola Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah lingkup Anggaran, Perbendaharaan, Verifikasi, dan Akuntansi.

#### 2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah.

### 3. Sub Bagian Perencanaan

Sub bagian perencanaan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pengendalian data, pembinaan evaluasi program / kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah.

### 4. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian, mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan administrasi keuangan serta merumuskan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan.

### 5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dan mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam menyelenggarakan ketatausahaan rumah tangga dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

### 6. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup penyusunan anggaran dan petunjuk teknis dalam menyelenggarakan Penyusunan APBD, perubahan APBD, nota pengantar APBD, nota pengantar perubahan APBD dan Otoritas Anggaran.

### 7. Sub Bidang Penyusunan APBD

Sub Bidang penyusunan APBD dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas bidang perencanaan, pendapatan

dan pendataan dalam urusan perencanaan pendapatan daerah, pendaftaran dan pendataan pajak dan retribusi daerah.

#### 8. Sub Bidang Otorisasi Anggaran

Sub bidang otorisasi anggaran dipimpin oleh seorang kepala sub bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang anggaran. mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang anggaran lingkup Otorisasi Anggaran.

#### 9. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang kepala bidang ,yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup pembebanan belanja langsung ,belanja tidak langsung ,pembiayaan dan pengelola kas daerah.

#### 10. Sub Bidang Belanja Langsung

Sub Bidang Belanja Langsung dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang perbendaharaan lingkup belanja Langsung.

#### 11. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung, Pembiayaan dan Pengelolaan KASDA

Sub Bidang Belanja Tidak Langsung, pembiayaan dan pengelolaan kas dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang perbendaharaan lingkup Belanja Tidak Langsung, Pembiayaan dan Pengelolaan Kas Daerah.

## 12. Bidang Verifikasi

Bidang verifikasi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas lingkup BKD di Bidang Verifikasi.

## 13. Sub Bidang Verifikasi Penatausahaan Keuangan

Penatausahaan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Verifikasi yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang melaksanakan sebagian tugas Bidang Verifikasi lingkup Penatausahaan Keuangan.

## 14. Sub Bidang Verifikasi Pertanggungjawaban

Sub Bidang Verifikasi pertanggungjawaban dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Verifikasi mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang Verifikasi lingkup verifikasi pertanggungjawaban.

## 15. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup Akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

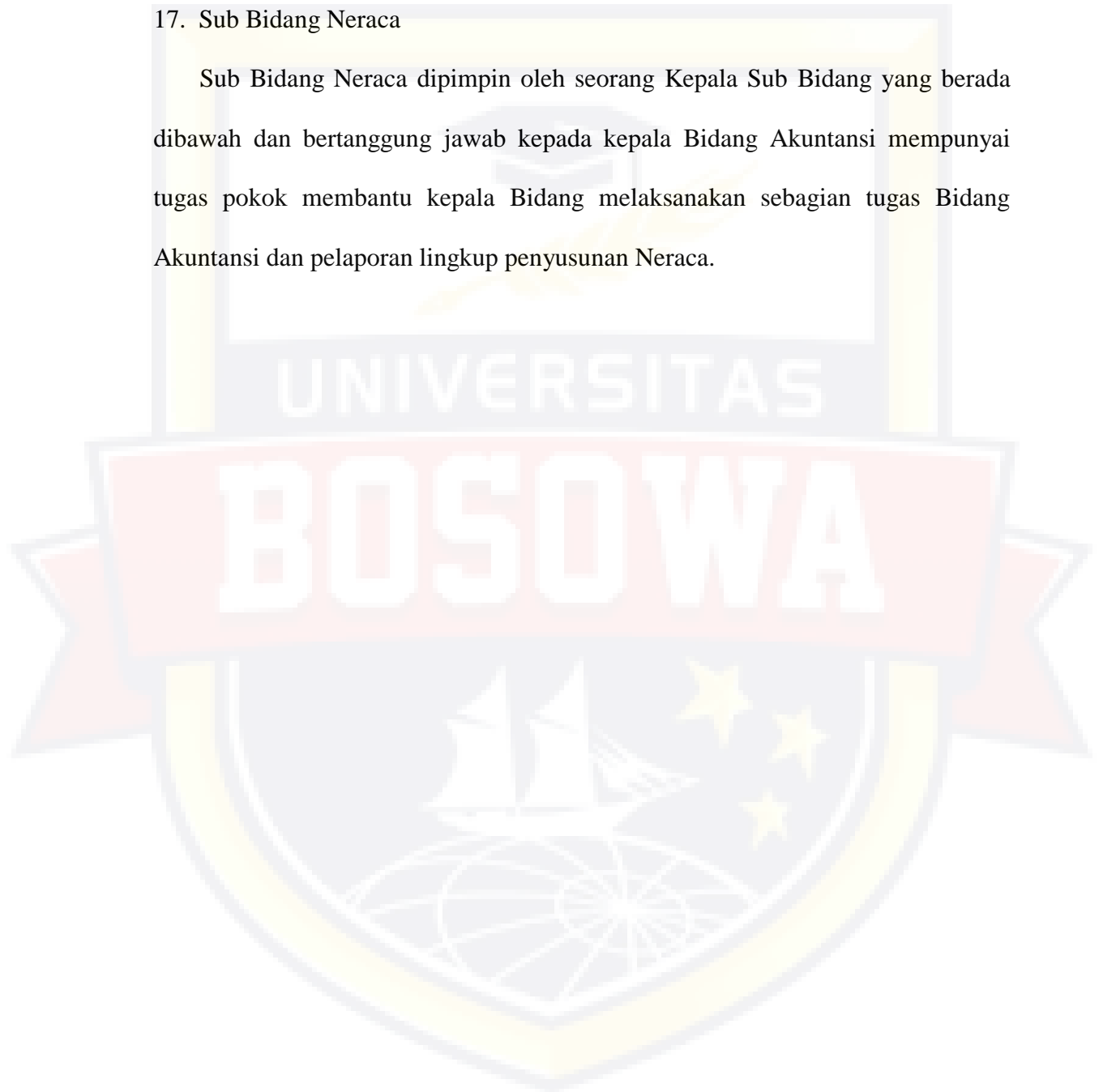
## 16. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang

Akuntansi mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang melaksanakan sebagian tugas Bidang Akuntansi lingkup pembukuan dan pelaporan.

#### 17. Sub Bidang Neraca

Sub Bidang Neraca dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang melaksanakan sebagian tugas Bidang Akuntansi dan pelaporan lingkup penyusunan Neraca.



## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 klasifikasi Aset Tetap

Perbandingan Aset Tetap Badan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang Dengan PSAP Nomor 07

Tabel 4.1

#### Perbandingan Pencatatan Aset Tetap

<b>Pembagian Aset Tetap Dengan PSAP Nomor 07</b>	<b>Pembagian Aset Tetap Badan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang</b>	<b>Ket.</b>
Tanah	Tanah	Sesuai
Peralatan dan mesin	Peralatan dan mesin	Sesuai
Gedung dan bangunan	Gedung dan bangunan	Sesuai
Jalan, irigasi dan jaringan	Jalan, irigasi dan jaringan	Sesuai
Aset tetap lainnya	Aset tetap lainnya	Sesuai
Konstruksi dalam pengerjaan	Konstruksi dalam pengerjaan	Sesuai

**Sumber : Data diolah, 2022**

Pada tabel diatas pembagian yang dilakuan badan keuangan dan aset Daerah Kabupaten Enrekang terhadap aset tetapnya sudah sesuai dengan atau tidak ada perbedaan dengan SAP sehingga dapat disimpulkan tingkat kesesuaian 100% menunjukan tidak ada masalah dalam pengkalisifikasian ini karena sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku pada umumnya.



#### 4.2.2 Pengakuan Akuntansi Aset Tetap

Tabel 4.2  
Aset Tetap Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2019

Nama aset	Tahun 2019 (Rp)
Tanah	293,851,434,073.57
Peralatan dan mesin	276,403,033,529.27
Gedung dan bangunan	717,662,200,487.45
Jalan, irigasi dan jaringan	1,194,390,615,189.45
Aset tetap lainnya	9,205,234,945.16
Konstruksi dalam pengerjaan	33,811,868,105.72
Akumulasi penyusutan	(736,682,611,196.64)
<b>Jumlah aset tetap</b>	<b>1,788,641,774,533.98</b>

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang, 2019

Tabel 4.3  
Aset Tetap Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2020

Nama aset	Tahun 2020 (Rp)
Tanah	295,556,894,172.98
Peralatan dan mesin	300,313,019,797.94
Gedung dan bangunan	770,886,860,400.65
Jalan, irigasi dan jaringan	1,308,345,092,031.17
Aset tetap lainnya	13,701,120,693.04
Konstruksi dalam pengerjaan	57,776,169,188.88
Akumulasi penyusutan	(837,644,832,861.70)
<b>Jumlah aset tetap</b>	<b>1,908,934,321,422.97</b>

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang, 2020

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan

pemerintah, sehingga SAP ini dapat disajikan pedoman bagi pemerintah khususnya badan pengelola keuangan aset daerah dalam membuat pertanggung jawaban .

Dengan menggunakan SAP maka laporan keuangan pemerintah diharapkan lebih informatif dan pemakai laporan keuangan dapat menilai akuntabilitas atas perolehan dan manfaat sumber daya . analisis terhadap aset tetap pengelola keuangan aset daerah sebagai berikut:

#### 1. Tanah

Menurut SAP, aset tanah dicatat di neraca sebesar biaya perolehan, dan apabila tidak memungkinkan atau sulit diperoleh nilai historisnya maka menggunakan nilai yang dapat diestimasi. Pada Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Enrekang aset tanah dinilai sebesar biaya perolehan, dan bagi aset tanah yang tidak memiliki nilai historis dinilai berdasarkan harga yang wajar (diestimasi). Pada tahun 2019, saldo tanah sebesar Rp293.851.434.073,57 dan pada tahun 2020 terdapat realisasi tanah sebesar Rp1.705.470.099,41 sehingga saldo tanah pada tahun 2020 sebesar Rp295.556.894.172,98

#### 2. Peralatan Dan Mesin

Menurut SAP, peralatan dan mesin dicatat di neraca sebesar harga perolehan dan mempunyai masa manfaat 12 bulan atau lebih. Sedangkan dalam neraca Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Enrekang, aset peralatan dan mesin dicatat sebesar harga perolehan dan mempunyai masa manfaat 12 bulan atau lebih. Pada tahun 2019, saldo peralatan dan mesin adalah sebesar Rp276.403.033.529,27 pada tahun 2020, terdapat realisasi belanja modal untuk

peralatan dan mesin sebesar Rp20.909.986.268,67 sehingga saldo peralatan dan mesin pada Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Enrekang selama 2 tahun dari tahun 2019-2020 sebesar Rp300.313.019.797,94

### 3. Gedung Dan Bangunan

Menurut SAP, aset gedung dan bangunan dicatat dalam neraca sebesar harga perolehan dan mempunyai masa manfaat 12 bulan atau lebih. Sedangkan dalam neraca Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Enrekang, aset gedung dan bangunan sebesar harga perolehan dan mempunyai masa manfaat 12 bulan. Pada tahun 2019, saldo aset gedung dan bangunan adalah sebesar Rp717.662.200.489,45 pada tahun 2020 terdapat realisasi belanja modal untuk pengadaan aset gedung dan bangunan sebesar Rp53,224,659,913.2 sehingga saldo gedung dan bangunan pada Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Enrekang selama 2 tahun dari tahun 2019-2020 sebesar Rp770.888.860.400,65

### 4. Jalan, Irigasi Dan Jaringan

Menurut SAP, aset jalan, irigasi dan jaringan dicatat dalam neraca sebesar harga perolehan dan mempunyai masa manfaat 12 bulan atau lebih. Sedangkan dalam Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Enrekang, aset jalan, irigasi dan jaringan dicatat sebesar harga perolehan dan mempunyai manfaat 12 bulan . pada tahun 2019, aset jalan, irigasi dan jaringan adalah sebesar Rp1.194.390.615.189,45. pada tahun 2020 terdapat realisasi belanja modal untuk pengadaan aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp113.954.476.842,28 sehingga saldo jalan, irigasi dan jaringan pada Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah

Kabupaten Enrekang selama 2 tahun dari tahun 2019-2020 sebesar Rp1.308.345.092.031,17

#### 5. Aset Tetap Lainnya

Menurut SAP, aset tetap lainnya dicatat dalam neraca sebesar harga perolehan dan mempunyai masa manfaat 12 bulan atau lebih. Sedangkan dalam Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Enrekang, aset tetap lainnya dicatat berdasarkan harga perolehan dan mempunyai masa manfaat 12 bulan atau lebih yaitu 4 tahun. pada tahun 2019, saldo aset tetap lainnya sebesar Rp9.205.234.945,16 . pada tahun 2020 terdapat realisasi belanja modal sebesar Rp4.495.885.747,88 sehingga saldo aset tetap lainnya Pada Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Enrekang selama 2 tahun dari tahun 2019-2020 sebesar Rp13.701.120.693,04

#### 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Menurut SAP, aset konstruksi dalam pengerjaan dicatat dalam neraca sebesar harga perolehan dan mempunyai masa manfaat 12 bulan atau lebih. Sedangkan dalam Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Enrekang, aset konstruksi dalam pengerjaan dicatat berdasarkan harga perolehan dan mempunyai masa manfaat 12 bulan. Pada tahun 2019 saldo konstruksi dalam pengerjaan adalah sebesar Rp33.811.868.105,72. Pada tahun 2020 terdapat realisasi belanja modal sebesar Rp23.964.299.082,72 sehingga saldo konstruksi dalam pengerjaan Pada Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Enrekang selama 2 tahun dari tahun 2019-2020 sebesar Rp57.776.167.188,70.

Menurut Ibu Andi Nirwana selaku Pendamping Aset Kabupaten Enrekang (2022), mengatakan bahwa :

“Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomis masa depan dapat diperoleh atau diterima serta disahkan hak kepemilikannya dan nilainya dapat diukur secara andal. Pencatatannya sebesar harga perolehannya. Aset tetap BKAD ada yang diperoleh dari APBD, pemerintah provinsi, pembelian dan donasi. Pengakuan aset tetap menggunakan metode *accrual*. Aset tetap pada BKAD mempunyai masa manfaat Ekonomis 12 bulan sesuai dengan Standard Akuntansi Pemerintah. Yaitu: aset memiliki wujud fisik, mempunyai manfaat 12 bulan, dapat diukur secara andal, tidak digunakan untuk dijual.”

#### **4.2.3 Pengukuran Aset Tetap**

Hasil dari perbandingan Pengukuran Aset Tetap pada Badan Keuangan dan aset Daerah (BKAD) sudah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 pernyataan nomor 07, dimana Aset tetap yang dinilai dengan biaya perolehan apabila Penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai aset lainnya. Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dengan pos aset tetap.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga barang atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat dibagikan

secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Suatu aset tetap dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikannya aset yang serupa, tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui didalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang lepas. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Menurut Andi Nirwana selaku pendamping Aset BKAD Kabupaten Enrekang (2022), mengatakan bahwa :

“pengukuran nilai aset pada BKAD Kabupaten Enrekang menggunakan harga perolehan yaitu pencatatan sebesar harga belinya serta biaya-biaya lain sudah termasuk dalam total biaya perolehan, Aset tetap yang memenuhi kualifikasi pada awalnya harus diukur sebesar harga perolehannya”

#### **4.2.4 Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap**

Hasil dari perbandingan pengeluaran setelah perolehan Aset Tetap pada Badan Keuangan dan aset Daerah (BKAD) sudah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 (SAP) Pernyataan Nomor 07, dimana Pengeluaran setelah perolehan aset tetap awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi masa manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai Batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja untuk pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan.

Menurut ibu Andi Nirwana BKAD Kabupaten Enrekang (2022), mengatakan bahwa :

“Biaya dikeluarkan untuk biaya perbaikan diakui sebagai biaya perawatan pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap tersebut untuk mendapatkan masa manfaat di masa depan . Dan jika sudah tidak bisa diperbaiki maka sudah tidak dipakai atau dimusnahkan”

#### **4.2.5 Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal**

Hasil dari perbandingan pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sudah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 (SAP) Pernyataan Nomor 07, dimana Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Dimana metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

Aset tetap merupakan komponen aset operasi pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintah dan rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatannya. Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tersebut, maka diterapkan masa manfaat dari masing-masing kelompok aset tetap. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.

Menurut Ibu Andi Nirwana selaku pendamping Aset BKAD Kabupaten Enrekang (2022), mengatakan bahwa :

“Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan dan penyusutan untuk periode sekarang dan yang akan

datang harus dilakukan penyesuaian. Untuk metode penyusutan menggunakan alokasi penyusutan metode garis lurus”

#### **4.2.6 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap**

Hasil dari perbandingan Penghentian dan Pelepasan pada Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) sudah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 (SAP) pernyataan Nomor 07, dimana Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Penghentian dan pelepasan aset tetap didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Aset-aset yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah, maka aset tetap tersebut direklasifikasi dalam kelompok aset lainnya. Suatu aset tetap dilepaskan atau dihentikan secara permanen setelah mendapatkan persetujuan penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku, maka aset tetap tersebut dieliminasi dari neraca. Beberapa keadaan dan alasan penghentian aset tetap antara lain adalah dihibahkan, dipertukarkan dengan aset tetap lainnya, Dijadikan penyertaan modal, dijual dan dimusnahkan apabila aset daerah tidak bisa difungsikan lagi dan selain itu tidak bisa difungsikan, juga telah memenuhi persyaratan untuk dimusnahkan.

Menurut ibu Andi Nirwana Selaku pendamping Aset BKAD Kabupaten Enrekang (2022), mengatakan bahwa :

“Apabila aset tetap sudah tidak dapat digunakan serta sudah tidak bisa difungsikan atau sudah rusak maka penggunaan dari aset tersebut dihentikan atau dimusnahkan. Eliminasi aset tetap dari neraca tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang terdapat pada dokumen bukti pendukung”



#### 4.2.7 Penyajian Dan Pengungkapan Aset Tetap Dalam Laporan Keuangan

Tabel 4.4

##### BKAD Kabupaten Enrekang Neraca

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Tanah	295,556,894,172.98	293,851,434,073.57
Peralatan dan mesin	300,313,019,797.94	276,403,033,529.27
Gedung dan bangunan	770,886,860,400.65	717,662,200,487.45
Jalan, irigasi dan jaringan	1,308,345,092,031.17	1,194,390,615,189.45
Aset tetap lainnya	13,701,120,693.04	9,205,234,945.16
Konstruksi dalam pengerjaan	57,776,169,188.88	33,811,868,105.72
Akumulasi penyusutan	(837,644,832,861.70)	(736,682,611,196.64)
<b>Total aset tetap</b>	<b>1,908,934,321,422.97</b>	<b>1,788,641,774,533.98</b>

#### Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang

Didalam penyajian aset tetap pada laporan keuangan BKAD Kabupaten Enrekang menyajikan secara terpisah seperti tanah, bangunan dan gedung, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Serta menyajikan aset tetap dalam neraca sebesar harga perolehannya dikurangi dengan akumulasi penyusutan. begitu juga dengan akumulasi penyusutan, kita bisa mengetahui saldo dari akumulasi penyusutan pada akhir tahun atau periode dalam daftar aset tetap. Serta setiap akhir periode, jumlah tercatat aset tetap direkonsiliasi untuk dilaporkan tentang jumlah penambahan, mutasi aset tetap dan lain- lain”.

BKAD Kabupaten Enrekang telah menyajikan komponen aset tetapnya dengan benar pada laporan posisi keuangan, hanya saja, penyajian akumulasi penyusutannya tidak dilakukan secara terpisah yaitu akumulasi penyusutan seluruh aset tetap digabungkan dalam satu nilai sehingga tidak dapat dilihat langsung berapa akumulasi penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap.

Menurut Ibu Andi Nirwana selaku pendamping asset BKAD Kabupaten Enrekang (2022), mengatakan bahwa :

“Semua aset yang dimiliki Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang sudah disajikan dalam neraca sebesar harga perolehannya dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan untuk setiap akhir periode, jumlah tercatat aset tetap direkonsiliasikan untuk dilaporkan tentang jumlah penambahan, mutasi aset tetap dan lain- lain”

#### **4.3 Perbandingan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap BKAD Kabupaten Enrekang dengan PSAP Nomor 07**

Tabel 4.5

Perbandingan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap BKAD Kabupaten Enrekang Dengan PSAP Nomor 07

<b>Perlakuan Akuntansi</b>	<b>PSAP Nomor 07</b>	<b>Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang</b>	<b>Ket.</b>
<b>Pengakuan</b>	pengakuan aset tetap akan sangat andal apabila aset tetap telah diterima atau disahkan kepemilikannya pada saat penguasanya berpindah	Pengakuan aset tetap terjadi apabila dapat memberikan manfaat ekonomis di masa depan	Sesuai
	Biaya perolehan dapat diukur secara andal	Biaya perolehan dapat diukur secara andal	Sesuai
	Masa manfaat lebih dari 12 bulan	Masa manfaat 12 bulan atau dapat memberikan manfaat ekonomis masa	Sesuai

		depan	
	Digunakan untuk kegiatan operasional dan tidak untuk dijual	Aset tetap digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan tidak untuk dijual	Sesuai
<b>Pengukuran</b>	Aset tetap dinilai dengan harga perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan	Aset tetap dinilai dengan harga perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan	Sesuai
	Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan	Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan	Sesuai
	Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksud.	Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksud	Sesuai
	Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan	Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan	Sesuai
<b>Pengeluaran</b>	Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa	Pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat	Sesuai

	manfaat atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.	di masa yang akan datang yang digunakan dalam kegiatan oprasional.	
<b>Penyusutan</b>	Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyusuaian pada masing-masing akun aset tetap	Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyusuaian pada masing-masing akun aset tetap	Sesuai
	Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain: (a) Metode Garis Lurus ( <i>straighy line method</i> ) (b) Metode Saldo Menurun Ganda ( <i>double declining balance method</i> ) (c) Metode Unit Produksi ( <i>unit of production metho</i>	Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus ( <i>straight line method</i> ), dimana metode penyusutan ini metode penyusutan paling sederhana dan mudah dipahami	Sesuai
	Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.	Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian	Sesuai
<b>Penghentian</b>	Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen	dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya	Sesuai

	dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang.	dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.	
	Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan	Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan	Sesuai
	Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya	Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya	Sesuai
<b>Penyajian dan pengungkapan</b>	Laporan keuangan harus mengungkapkan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat	Penyajian aset tetap dinyatakan sebesar harga perolehan	Sesuai
	setiap jenis aset seperti tanah, gedung, bangunan, peralatan mesin dan lain sebagainya harus dinyatakan dalam neraca secara terpisah catatan atas umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan	Setiap jenis aset dinyatakan dalam neraca secara terpisah pada catatan atas laporan keuangan	Sesuai
	Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode	Laporan keuangannya mengungkapkan Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode	Sesuai

Sumber : Data diolah, 2022

Dari pembahasan di atas, hasil analisis penyajian pos-pos aset tetap dan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang dapat diringkas sebagai berikut:

1. Tanah

Aset tanah disajikan dalam neraca telah sesuai dengan aset SAP, Tanah dinilai berdasarkan harga perolehan.

2. Peralatan Dan Mesin

Aset peralatan dan mesin disajikan dalam neraca telah sesuai dengan aset SAP, karena aset dicatat dalam neraca sebesar harga perolehan dan mempunyai manfaat 12 bulan atau lebih.

3. Gedung Dan Bangunan

Aset gedung dan bangunan yang disajikan dalam neraca sesuai dengan SAP, karena aset dicatat dalam neraca sebesar harga perolehan dan mempunyai manfaat 12 bulan atau lebih.

4. Jalan, Irigasi Dan Jaringan

Aset jalan irigasi dan jaringan yang disajikan dalam neraca sesuai dengan SAP, karena aset dicatat dalam neraca sebesar harga perolehan dan mempunyai manfaat 12 bulan atau lebih.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya yang disajikan dalam neraca sesuai dengan SAP, karena aset dicatat dalam neraca sebesar harga perolehan dan mempunyai manfaat 12 bulan atau lebih.

## 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset konstruksi dalam pengerjaan yang disajikan dalam neraca sesuai dengan SAP, karena aset dicatat dalam neraca sebesar harga perolehan dan mempunyai manfaat 12 bulan atau lebih.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan mengenai Perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Enrekang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 (SAP) Pernyataan Nomor 07 serta Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2016 tentang aset tetap yang sudah menerapkan SAP berbasis akrual yang artinya bahwa semua perlakuan akuntansi aset tetap yang diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang yang terdiri dari pembagian aset tetap, pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, pengeluaran setelah perolehan awal, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan aset tetap. Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Enrekang melakukan penyusutan menggunakan metode garis lurus untuk menghitung penyusutan aset tetap sudah sesuai dengan PSAP Nomor 07. Hal ini dikarenakan di dalam SAP apabila masa manfaat sudah habis masa manfaatnya tidak digunakan lagi.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah Pemerintah Kabupaten Enrekang diharapkan selalu mengikuti Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang perlakuan Aset Tetap dan dapat meningkatkan kemampuan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, baik itu dengan memberikan bimbingan teknis dan



pelatihan mengenai pengelolaan aset tetap daerah ataupun dengan melakukan perekrutan pegawai yang ahli dalam bidang keuangan. Dengan begitu diharapkan penyusunan laporan keuangan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu sehingga memudahkan penyusunan laporan keuangan Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang.



### Daftar Pustaka

- Ardana, I.C., And Lukman, H. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Asman, 2017. *Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Stikes Mega Resky Makassar*. Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar
- Fitriyah, Lailatul, Zainal, Wiyono, M, Wimbo, Ifa Khoirul.2018. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Daerah Dalam Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang, (Online), Vol. 1. No. 2. <https://jkm.stiwedyagamulumajang.ac.id./index.php/jra>
- Fista A, Sujaya, Yanti, Rivan Wibowo.2020. Penerapan Psap Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada BadanPengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung Vol.5.No. 2
- Fitriani,B. 2019. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Rumah Sakit Ibu Dan Anak Sitti Khadijah III Di Makassar.Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2016. *Standar Akuntansi Keuangan*. Revisi 2016. Salemba Empat. Jakarta.
- Israfil. 2020. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap PT Bosowa Marga Nusantara Makassar.Universitas Bosowa Makassar.
- Kieso, Donald E. Weygandt, Jerry J. Warifel, Terry D. 2017. *Akuntansi Intermediate*. Edisi IFRS. Jakarta; Salemba Empat.
- Kieso, Donald E. Weygandt, Jerry J. Warifel, Terry D. 2018.*Akuntansi Keuangan Menengah: Intermediate Accounting*, Edisi IFRS, Vol 1 Salemba Empat, Jakarta Selatan. 12160
- Muhammad Indris. 2019. *Manajemen Keuangan*, Fakultas Ekonomi Bosowa Makassar
- Raki asyqar,2019. Analisis Penerapan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Angkat Berdasarkan PSAP Nomor 07 Tahun 2010. Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Rudianto. 2012. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.

R. Baso, Bintary, Selviani, Sumarni. 2020. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). (online). Vol. 1. No. 1. <http://doi.org/10.37531/ecotal.vli1.6>.

Shella Iko Sita, Ririn Irmadariyani, Andriana. 2017. Analisis Perlakuan Aset Tetap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Universitas Jember.Vol.IV (1) 40-43

Samryn, 2016. *Pengantar Akuntansi ,Etpde Untuk Elemen Laporan Keuangan Diperkaya Dengan Presefektif IFRS & Perbankan*. Jakarta : Rajawali.

Sumarsan, Thomas, 2017. *Perpajakan Indonesia*. Indeks Fsab, Financial Accounting Standras Board.

Samryn,L.M.2015. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Samryn, 2016. Pengantar akuntansi metode akuntansi untuk elemen laporan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

**BOSOWA**





# LAMPIRAN

### **Pertanyaan wawancara**

1. Apa standar akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang?
2. Mulai kapan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang menerapkan PSAP Nomor 07?
3. Bagaimana cara penyajian Aset Tetap Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang?
4. Bagaimana cara pengakuan Aset Tetap Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang?
5. Apakah pengakuan Aset Tetap Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang Dapat Dihentikan?
6. Bagaimana pengeluaran setelah perolehan pada Aset Tetap Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang?
7. Kapan dilakukan penghentian/penghapusan pengakuan Aset Tetap Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang ?
8. Bagaiman cara pengukuran Aset Tetap Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang?
9. Metode penyusutan apa yang digunakan dalam penyusutan Aset Tetap Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang?
10. Aset Tetap pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang diperoleh dari mana saja?

### **Rincian Aset Tetap**

**Provinsi** : Provinsi Sulawesi - Selatan  
**Kab./Kota** : Pemerintah Kabupaten Enrekang  
**Bidang** :  
**Unit Organisasi** : Badan Pengelola Keuangan Daerah  
**Sub Unit Organisasi** : Badan Pengelola Keuangan Daerah  
**U P B** : Badan Pengelola Keuangan Daerah



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG**  
**KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)**  
**REKAPITULASI ASET TETAP**  
**TAHUN 2010 - 2020**

NO. KODE LOKASI :

NO URUT	GOLONGAN	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	TOTAL
1	2	3	4	5	8
1	01	01	<b>TANAH</b>	-	<b>6,278,902,000.00</b>
2	02		<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	-	<b>3,290,636,116.00</b>
		01	a. Alat Besar		-
		02	b. Alat Angkutan		1,793,890,189.00
		03	c. Alat Bengkel dan Alat Ukur		-
		04	d. Alat Pertanian		-
		05	e. Alat Kantor dan Rumah Tangga		722,119,133.00
		06	f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar		24,716,800.00
		07	g. Alat Kedokteran dan Kesehatan		-
		08	h. Alat Laboratorium		-
		09	i. Alat Persenjataan		-
		10	j. Komputer		749,909,994.00
		11	k. Alat Eksplorasi		-
		12	l. Alat Pengeboran		-
		13	m. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian		-
		14	n. Alat Bantu Eksplorasi		-
		15	o. Alat Keselamatan Kerja		-
		16	p. Alat Peraga		-
		17	q. Peralatan Proses Produksi		-
		18	r. Rambu - Rambu		-
		19	s. Peralatan Olahraga		-
3	03		<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	-	<b>13,478,511,906.30</b>
		01	a. Bangunan Gedung		13,478,511,906.30
		02	b. Bangunan Monumen		-
		03	c. Bangunan Menara		-
		04	d. Tugu Titik Kontrol/Pasti		-
4	04		<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	-	<b>8,500,000.00</b>
		01	a. Jalan Lingkungan		-
		02	b. Bangunan Air dan Saluran Proteksi		-
		03	c. Instalasi		-
		04	d. Jaringan		8,500,000.00
5	05		<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	-	-
		01	a. Bahan Perpustakaan		-
		02	b. Barang Bercorak kesenian/Kebudayaan/Olahraga		-
		03	c. Hewan		-
		04	d. Biota Perairan		-
		05	e. Tanaman		-
		06	f. Barang Koleksi Non Budaya		-
		07	g. Aset Tetap Dalam Renovasi		-
6	06		<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>		-
			<b>JUMLAH</b>	-	<b>23,056,550,022.30</b>

Enrekang,

Disetujui,  
 Pengguna Barang

Mengetahui,  
 An. Sekretaris Daerah  
 Kepala Bagian Aset,

Pengurus Barang,

**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**  
**REKAP PENYUSUTAN ASET 2020**

NO URUT	GOLONGAN	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	HARGA PEROLEHAN	AKUMULASI S/D 2019	BEBAN PENYUSUTAN		AKUMULASI SD 2020	NILAI BUKU 2020
						SEMESTER 1	SEMESTER 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	01	TANAH						
2	02		PERALATAN DAN MESIN	3,290,636,116.00	2,477,768,300.98	132,475,656.36	132,475,656.36	2,742,719,613.69	547,916,502.31
		01	a. Alat Besar						
		02	b. Alat Angkutan	1,793,890,189.00	1,137,617,457.31	103,290,156.36	103,290,156.36	1,344,197,770.02	449,692,418.98
		03	c. Alat Bengkel dan Alat Ukur						
		04	d. Alat Pertanian						
		05	e. Alat Kantor dan Rumah Tangga	722,119,133.00	688,467,466.33	8,596,000.00	8,596,000.00	705,659,466.33	16,459,666.67
		06	f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	24,716,800.00	24,716,800.00	-	-	24,716,800.00	-
		07	g. Alat Kedokteran dan Kesehatan						
		08	h. Alat Laboratorium						
		09	i. Alat Persenjataan						
		10	j. Komputer	749,909,994.00	626,966,577.33	20,589,500.00	20,589,500.00	668,145,577.33	81,764,416.67
		11	k. Alat Eksplorasi						
		12	l. Alat Pengeboran						
		13	m. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian						
		14	n. Alat Bantu Eksplorasi						
		15	o. Alat Keselamatan Kerja						
		16	p. Alat Peraga						
		17	q. Peralatan Proses Produksi						
		18	r. Rambu - Rambu						
		19	s. Peralatan Olahraga						
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN	13,478,511,906.30	2,483,827,835.07	132,210,005.37	132,210,005.37	2,748,247,845.82	10,730,264,060.48
		01	a. Bangunan Gedung	13,478,511,906.30	2,483,827,835.07	132,210,005.37	132,210,005.37	2,748,247,845.82	10,730,264,060.48
		02	b. Bangunan Monumen						
		03	c. Bangunan Menara						
		04	d. Tugu Titik Kontrol/Pasti						
4	04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	8,500,000.00	2,975,000.00	212,500.00	212,500.00	3,400,000.00	5,100,000.00
		01	a. Jalan dan Jembatan						
		02	b. Bangunan Air						
		03	c. Instalasi						
		04	d. Jaringan	8,500,000.00	2,975,000.00	212,500.00	212,500.00	3,400,000.00	5,100,000.00
5	05		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-
		01	a. Bahan Perpustakaan						
		02	b. Barang Bercorak kesenian/Kebudayaan/Olahraga						
		03	c. Hewan						
		04	d. Biota Perairan						
		05	e. Tanaman						
		06	f. Barang Koleksi Non Budaya						
		07	g. Aset Tetap Dalam Renovasi						
6	06		KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN						
<b>JUMLAH</b>				<b>16,777,648,022.30</b>	<b>4,964,571,136.05</b>	<b>264,898,161.73</b>	<b>264,898,161.73</b>	<b>5,494,367,459.51</b>	<b>11,283,280,562.79</b>















Provinsi  
Kab./Kota  
Bidang  
Unit Organisasi  
Sub Unit Organisasi  
U P B

PROVINSI  
PEMERINTAH  
PENDAPATAN  
BADAN PENGELOLA  
BADAN PENGELOLA  
BADAN PENGELOLA  
DAERAH  
ENREKANG  
KEUANGAN DAERAH  
KEUANGAN DAERAH  
KEUANGAN DAERAH



REKAP PENYUSUTAN ASSET TETAP  
KIB C. GEDUNG DAN BANGUNAN  
TAHUN 2010 SAMPAI DENGAN TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG  
PENYUSUTAN TAHUN 2010 S/D 2020  
KIB C. GEDUNG DAN BANGUNAN

No. Kode Lokasi : 12.22.05.24.01.00.00

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Penyusutan			Masa Manfaat	Beban Penyusutan										Akum. Penyusutan s/d 2019	Nilai Buku s/d 2019	Penyusutan Per Semester	Beban Peny. 2020		Akum. Penyusutan s/d 2020	Nilai Buku 2020									
			Tanggal	Bulan	Tahun		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019				2020	2020			2020								
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
<b>PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG</b>																																
<b>1. Bangunan Gedung</b>																																
1	1	3	7	02	01	01	Bangunan Gedung Ciri Raga			2011	227.000.000,00	50			6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00
2	1	3	7	02	01	01	Bangunan Gedung Ciri Raga			2011	198.200.000,00	50			2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00
3	1	3	7	02	01	01	Bangunan Gedung Ciri Raga			2012	105.188.900,00	50			2.103.738,00	2.103.738,00	2.103.738,00	2.103.738,00	2.103.738,00	2.103.738,00	2.103.738,00	2.103.738,00	2.103.738,00	2.103.738,00	2.103.738,00	2.103.738,00	2.103.738,00	2.103.738,00	2.103.738,00	2.103.738,00	2.103.738,00	2.103.738,00
4	1	3	7	02	01	01	Bangunan Gedung Ciri Raga			2012	58.070.900,00	50			1.121.418,00	1.121.418,00	1.121.418,00	1.121.418,00	1.121.418,00	1.121.418,00	1.121.418,00	1.121.418,00	1.121.418,00	1.121.418,00	1.121.418,00	1.121.418,00	1.121.418,00	1.121.418,00	1.121.418,00	1.121.418,00	1.121.418,00	1.121.418,00
5	1	3	7	02	01	01	Bangunan Gedung Ciri Raga			2018	110.785.848,00	50			2.215.712,98	2.215.712,98	2.215.712,98	2.215.712,98	2.215.712,98	2.215.712,98	2.215.712,98	2.215.712,98	2.215.712,98	2.215.712,98	2.215.712,98	2.215.712,98	2.215.712,98	2.215.712,98	2.215.712,98	2.215.712,98	2.215.712,98	2.215.712,98
6	1	3	7	02	01	01	Bangunan Gedung Tempak Persegi			2018	70.000.000,00	50			1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Jumlah Bangunan Gedung							817.793.648,00			9.315.869,00	12.740.156,00	12.740.156,00	12.740.156,00	12.740.156,00	12.740.156,00	12.740.156,00	12.740.156,00	12.740.156,00	12.740.156,00	12.740.156,00	12.740.156,00	12.740.156,00	12.740.156,00	12.740.156,00	12.740.156,00	12.740.156,00	12.740.156,00	12.740.156,00	12.740.156,00	12.740.156,00	12.740.156,00	
<b>2. Bangunan Monumen</b>																																
<b>3. Bangunan Menara</b>																																
<b>4. Tangki Tekst Kontrol/Past</b>																																
Jumlah Bangunan Monumen							-			-			-			-			-			-			-			-				
Jumlah Bangunan Menara							-			-			-			-			-			-			-			-			-	
Jumlah Tangki Tekst Kontrol/Past							-			-			-			-			-			-			-			-			-	
Jumlah Bangunan Monumen							-			-			-			-			-			-			-			-			-	
Jumlah Bangunan Menara							-			-			-			-			-			-			-			-			-	
Jumlah Tangki Tekst Kontrol/Past							-			-			-			-			-			-			-			-			-	
<b>JMLAH PENYUSUTAN KIB C</b>							817.793.648,00			9.315.869,00	12.740.156,00	12.740.156,00	12.740.156,00	12.740.156,00	12.740.156,00	12.740.156,00	12.740.156,00	12.740.156,00	12.740.156,00	12.740.156,00	12.740.156,00	12.740.156,00	12.740.156,00	12.740.156,00	12.740.156,00	12.740.156,00	12.740.156,00	12.740.156,00	12.740.156,00	12.740.156,00	12.740.156,00	12.740.156,00

Mengetahui,  
An. Sekretaris Daerah  
Kepala Bidang Asset

Mengetahui,  
Kepala Badan Pengelola  
Keuangan Daerah

Enrekang, 30 Juni 2018  
Pengurus Barang,

SYAFRUDDIN, SE  
NIP. 19630812 198603 1 028



Provinsi  
Kab./Kota  
Bidang  
Unit Organisasi  
Sub Unit Organisasi  
U P B

PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG  
BIDANG KEMPRASWIL  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
DINAS PEKERJAAN UMUM



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG  
PENYUSUTAN ASET TETAP 2010  
KIB D JALAN, IRRIGASI DAN JARINGAN

NO. KODE LOKASI : 12.22.05.11.03.89.01.01

No. Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Perolehan			Harga Perolehan	Masa Manfaat (Bulan, Tahun)	Akum. Penyusutan s/d 2019	Nilai Buku s/d 2019	Tgl Rehab	Nilai Rehab	Harga Perolehan Baru	NDP	Beban Penyusutan 2020 Sebelum Rehab		NDP	Beban Penyusutan 2020 Setelah Rehab		Beban Penyusutan 2020		Akum. Penyusutan s/d 2020	Nilai Buku s/d 2020
		Tanggal	Bulan	Tahun									Semester 1	Semester 2		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
<b>PENYUSUTAN KIB D TAHUN 2010</b>																					
<b>1. Jalan dan Jembatan</b>																					
				Bulan																	
1	Asrama Permanen		2013		469.608.344,00	526	63.354.841,28	406.243.502,72			469.608.344,00							4.616.403,44	4.616.403,44	72.597.648,16	397.010.695,84
2	Asrama Permanen		2013		113.196.750,00	516	15.847.545,00	97.349.205,00			113.196.750,00							1.131.967,50	1.131.967,50	18.111.480,00	95.085.270,00
<b>Jumlah Jalan dan Jembatan</b>					<b>582.805.094,00</b>		<b>79.212.386,28</b>	<b>503.592.707,72</b>			<b>582.805.094,00</b>							<b>5.748.370,94</b>	<b>5.748.370,94</b>	<b>90.709.128,16</b>	<b>492.095.965,84</b>
<b>2. Bangunan Air dan Irigasi</b>																					
				bulan																	
<b>3. Instalasi</b>																					
				tahun																	
<b>Jumlah Instalasi</b>																					
<b>4. Jaringan</b>																					
				tahun																	
<b>Jumlah Jaringan</b>																					
<b>JUMLAH PENYUSUTAN KIB D TAHUN 2010</b>					<b>582.805.094,00</b>		<b>79.212.386,28</b>	<b>503.592.707,72</b>			<b>582.805.094,00</b>							<b>5.748.370,94</b>	<b>5.748.370,94</b>	<b>90.709.128,16</b>	<b>492.095.965,84</b>



Provinsi  
Kab./Kota  
Bidang  
Unit Organisasi  
Sub Unit Organisasi  
U P B

: PROVINSI SELATAN  
: PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG  
: PENDAPATAN DAERAH  
: BADAN PENYUSUTAN ASSET DAERAH  
: BADAN PENYUSUTAN ASSET DAERAH  
: BADAN PENYUSUTAN ASSET DAERAH



REKAP PENYUSUTAN ASSET TETAP  
KIB D. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN  
TAHUN 2010 SAMPAI DENGAN TAHUN  
2020

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG  
PENYUSUTAN TAHUN 2010 S/D 2020  
KIB D. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

No. Kode Lokasi : 12.22.05.24.01.00.00

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Perolehan			Harga Perolehan	Masa Manfaat	Beban Penyusutan									Akum. Penyusutan s/d 2019	Nilai Buku s/d 2019	Penyusutan Per Semester	Beban Peny. 2020		Akum. Penyusutan s/d 2020	Nilai Buku 2020
			Tanggal	Bulan	Tahun			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018				2019	Semester I		
PENYUSUTAN KIB D																							
1. Jalan dan Jembatan																							
Jumlah Jalan dan Jembatan																							
2. Bangunan Air																							
Jumlah Bangunan Air																							
3. Instalasi																							
Jumlah Instalasi																							
4. Jaringan																							
1	1	3	7	03	04	02	001	Jaringan Transmisi Lain-lain															
Jumlah Jaringan																							
JUMLAH PENYUSUTAN KIB D																							

Mengetahui,  
An. Sekretariat Daerah  
Kepala Bidang Aset

Mengetahui,  
Kepala Badan Pengelola  
Keuangan Daerah

Enrekang, 30 Juni 2018  
Pengurus Barang,

SYAFRUDDIN, SE  
NIP.19630812 198603 1 028

Provinsi  
Kab./Kota  
Bidang  
Unit Organisasi  
Sub Unit Organisasi  
U P B

: PROVINSI  
: PEMERIN  
: PENDAPA  
: BADAN PI  
: BADAN PI  
: BADAN PI



ELATAN  
ENREKANG  
UANGAN DAERAH  
UANGAN DAERAH  
UANGAN DAERAH

REKAP PENYUSUTAN ASSET TETAP  
KIB E. ASET TETAP LAINNYA  
TAHUN 2010 SAMPAI DENGAN TAHUN  
2020

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG  
PENYUSUTAN TAHUN 2010 S/D 2020  
KIB E. ASET TETAP LAINNYA

No. Kode Lokasi : 12.22.05.24.01.00.00

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Perolehan		Harga Perolehan	Masa Manfaat	Beban Penyusutan										Akum. Penyusutan s/d 2019	Nilai Buku s/d 2019	Penyusutan Per Semester	Beban Peny. 2020		Akum. Penyusutan s/d 2020	Nilai Buku 2020
			Tanggal	Bulan Tahun			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019				Semester I	Semester II		
<b>PENYUSUTAN KIB E</b>																							
<b>1. Bahan Perustakaan</b>																							
Jumlah Bahan Perustakaan																							
<b>2. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Diathraga</b>																							
Jumlah Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Diathraga																							
<b>3. Hewan</b>																							
Jumlah Hewan																							
<b>4. Biot Perairan</b>																							
Jumlah Biot Perairan																							
<b>5. Tanaman</b>																							
Jumlah Tanaman																							
<b>6. Barang Koleksi Non Budaya</b>																							
Jumlah Barang Koleksi Non Budaya																							
<b>7. Aset Tetap Dalam Renovasi</b>																							
Jumlah Aset Tetap Dalam Renovasi																							
<b>JUMLAH PENYUSUTAN KIB E</b>																							

Mengetahui,  
An. Sekretariat Daerah  
Kepala Bidang Aset

Mengetahui,  
Kepala Badan Pengelola  
Keuangan Daerah

Enrekang, 30 Juni 2018  
Pengurus Barang,

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Perubahan (Rp)
1	Tanah	293,851,434,073.57	295,556,894,172.98	1,705,460,099.41
2	Peralatan dan mesin	276,403,033,529.27	300,313,019,797.94	20,909,986,268.67
3	Gedung dan bangunan	717,662,200,487.45	770,886,860,400.65	53,224,659,913.2
4	Jalan, irigasi dan jaringan	1,194,390,615,189.45	1,308,345,092,031.17	113,954,476,842.28
5	Aset tetap lainnya	9,205,234,945.16	13,701,120,693.04	4,495,885,747.88
6	Konstruksi dalam pengerjaan	33,811,868,105.72	57,776,169,188.88	23,964,301,083.16



**Aset Tetap Tahun 2019**

<b>Nama aset</b>	<b>Tahun 2019 (Rp)</b>
Tanah	293,851,434,073.57
Peralatan dan mesin	276,403,033,529.27
Gedung dan bangunan	717,662,200,487.45
Jalan, irigasi dan jaringan	1,194,390,615,189.45
Aset tetap lainnya	9,205,234,945.16
Konstruksi dalam pengerjaan	33,811,868,105.72
Akumulasi penyusutan	(736,682,611,196.64)
<b>Jumlah aset tetap</b>	<b>1,788,641,774,533.98</b>

#### Aset Tetap Tahun 2020

<b>Nama aset</b>	<b>Tahun 2020</b>
Tanah	295,556,894,172.98
Peralatan dan mesin	300,313,019,797.94
Gedung dan bangunan	770,886,860,400.65
Jalan, irigasi dan jaringan	1,308,345,092,031.17
Aset tetap lainnya	13,701,120,693.04
Konstruksi dalam pengerjaan	57,776,169,188.88
Akumulasi penyusutan	(837,644,832,861.70)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>1,908,934,321,422.97</b>



# UNIVERSITAS BOSOWA

## FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Gd. 1 Lt. 6, Makassar-Sulawesi Selatan 90231

Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 125, Faks. 0411 424 568

<http://www.universitasbosowa.ac.id>

Nomor : A. 168 /FEB/UNIBOS/III/2022  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Izin Melakukan Penelitian

Kepada Yth,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Enrekang  
 Di, -

Tempat

Disampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar di bawah ini :

Nama : Nadiya  
 NIM : 45 18 013 058  
 Program Studi : Akuntansi  
 No. Tlp/HP : 082 292 482 964

Akan melakukan Penelitian dengan Judul :

**“Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang”**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menerima/mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan penelitian di lokasi yang diinginkan.

Demikian surat kami, atas bantuan yang diberikan, diucapkan terima kasih.

Makassar, 07 Maret 2022

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. A. Arifuddin Mane, SE., SH., M.Si.  
 NID. NIPN. 09 0707 7003

Tembusan :

1. Rektor Universitas Bosowa
2. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0420)-21079*  
**ENREKANG**

		Enrekang, 14 Maret 2022
Nomor	: 122/DPMPSTSP/IP/III/2022	Kepada
Lampiran	: -	Yth. Kepala BPKAD Enrekang
Perihal	: Izin Penelitian	Di Kec. Enrekang

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bosowa, Nomor: A.168/FEB/UNIBOS/III/2022 dan tanggal 07 Maret 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	: <b>Nadiya</b>
Tempat Tanggal Lahir	: Rante Lemo, 13 November 2000
Instansi/Pekerjaan	: Mahasiswi
Alamat	: Rante Lemo Desa Latimojong Kec. Buntu Batu

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: "Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang".

Dilaksanakan mulai, Tanggal 14 Maret 2022 s/d 14 Mei 2022

Pengikut/Anggota :-

Pada Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas fotocopy hasil skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian

A.n. BUPATI ENREKANG  
 Kepala DPMPSTSP Kab. Enrekang

**D. W. CHAIRUNNISA, S.E., MT**  
 Pejabat: Pembina  
 NIP. 197205282002121005

Tembusan Yth :

01. Bupati Enrekang (Sebagai Laporan).
02. Kepala BAKESBANG POL Kab. Enrekang.
03. Camat Enrekang.
04. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bosowa.
05. Yang Bersangkutan (*Nadiya*).
06. Pertinggal.



**DEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG  
BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH  
( B K A D )**

*Jalan Jend. Sudirman No. 01 Telp. (0420) 21086 Fax. 21921*  
**ENREKANG** 91712

Enrekang, 14 Maret 2022

Kepada

Nomor : 800/55/BKAD/III/2022  
Lamp :  
Perihal : Bersedia Menerima Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis  
Universitas Bosowa  
di-  
Makassar

Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu  
Pintu Nomor : 122/DPMTSP/IP/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022 Perihal Izin Penelitian,  
atas Nama :

Nama : **Nadiya**  
Tempat tanggal Lahir : Rante Lemo, 13 November 2000  
Alamat : Rante Lemo Desa Latimojong Kec.Buntu Batu

pada prinsipnya Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang (BKAD)  
bersedia menerima Penelitian pada Badan Keuangan dan Asset Daerah (BKAD),  
terhitung mulai tanggal 14 Maret 2022 s/d 14 Mei 2022 dalam rangka Penyusunan  
Skripsi dengan judul "**Analisis Perilaku Abstraksi Aset Tetap pada  
Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.**"

Demikian surat ini disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**Rahmat Djamil, ST.M.A.P.**  
Pangkat : Pembina (IV/a)  
NIS : 19720518 200212 2 003

